

## Mencari Pemimpin Negarawan Membangun Demokrasi Berkeadaban Dan Dinamika Pemilihan Umum Presiden 2024 Menuju Indonesia Emas

Hadi Karyono, Krismiyarsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

[hadi-karyono@untagsmg.ac.id](mailto:hadi-karyono@untagsmg.ac.id)

Published: 01/02/2023

How to Cite:

Karyono, H., Krismiyarsi. (2023). Mencari Pemimpin Negarawan Membangun Demokrasi Berkeadaban Dan Dinamika Pemilihan Umum Presiden 2024 Menuju Indonesia Emas. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (1), Pp 42-49. <https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.42-49>

### Abstract

*Besides having been ordered by God Almighty, the statesman leader was also not formed immediately. A statesman leader will always place professionalism and morals as the main standard. Leaders of statesmen whose policies depart from the collective interests of the people and minimize the domination of collegial interests originating from the group interested sts and encouragement. Leaders of statesmen never mathe ke empty promises. If you promise, the promithe se is a debt that will be accounted for vertically and horizontally. General elections are one of the vehicles for democracy as a manifestation of people's sovereignty. From the above expectations, we should be able to build a civilized democracy, a naresearchocracy that brings goodness and dignity and welfare to society (welfare state), far from SARA intrigues or identity politics. The role of the younger generation as the future leadership relay must be positioned, seated, and understood about future statesman leadersingle-spacedf 11-pointl parties is not only to produce a political leader but also to be able to produce a statesman leader.*

**Keywords:** Statesman Leaders; Civilized Democracy; Elections.

### I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum sebagai wahana demokrasi perwujudan kedaulatan ditangan rakyat sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar”. Selanjutnya Undang-Undang Dasar mengaturnya dalam BAB VIIB tentang Pemilihan Umum yaitu pasal 22 E ayat (1-5) (Latipah Nasution, 2017).

Pengertian demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Demokrasi memberikan kesempatan perubahan karena dapat menjawab persoalan masyarakat yang berubah-ubah. Demokrasi merupakan bentuk

pemerintahan yang semua warganya memiliki hak yang sama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka sebagai warga Negara. (Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, 2012).

Pemilu merupakan suatu mekanisme suksesi kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seorang pemimpin atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena dukungan suara mayoritas rakyat yang didapat melalui pemilu secara fair. Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu untuk menentukan siapa pemimpinnya (Mudiyati Rahmatunnisa, 2017)

Seorang pemimpin negarawan akan lebih meletakkan profesionalisme dan moral sebagai standar utama. Kebijakannya berangkat dari kepentingan kolektif rakyat dan meminimalkan dominasi kepentingan kolegal yang bersumber kepentingan dan dorongan kelompok. Sosok

negarawan tak pernah berjanji pepesan kosong. Jika berjanji, janjinya adalah utang yang akan dipertanggung jawabkan secara vertikal dan horizontal. Baginya, amanah sebagai seorang pemimpin harus membawa kesejahteraan dan kedamaian bagi umat manusia dan makhluk ciptaan-Nya. Indonesia Emas 2045 adalah suatu upaya dalam membangun generasi emas dimana sebuah konsep penerapan untuk menyiapkan suatu generasi penerus bangsa Indonesia pada 100 tahun emas Indonesia merdeka antara tahun 1945 sampai tahun 2045. Generasi Emas adalah generasi masa depan sebagai sumber daya manusia (SDM) yang perlu mendapat perhatian serius dalam era globalisasi saat ini karena generasi emas mempunyai peran yang sangat strategis dalam mensukseskan pembangunan nasional. Generasi emas merupakan generasi penerus bangsa yang sangat produktif, sangat berharga dan sangat bernilai, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik agar berkualitas menjadi insan yang berkarakter, insan yang cerdas, dan insan yang kompetitif, dan siap menjadi pemimpin negarawan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah mencari pemimpin negarawan melalui pemilihan umum Presiden 2024 yang demokratis dan berkeadaban dalam upaya menuju Indonesia emas.

## II. METODE

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian yang diteliti oleh peneliti antara adalah fenomena tentang masalah mencari pemimpin negarawan korelasinya dengan pemilu demokratis yang berkeadaban dan Indonesia emas. Sikap dan pandangan generasi muda terhadap pemimpin masa depan adalah penentuan strategis untuk Indonesia emas. Sehingga generasi muda harus diletakkan, didudukkan dan disiapkan dalam menyongsong Indonesia emas. Pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik observasi dokumen yang sudah ada/dipublish, seperti jurnal, buku-buku, dan internet yang mendukung. Peneliti melakukan pencarian dokumen yang diperlukan, kemudian diobservasi untuk diambil datanya kemudian dianalisis demi mendapatkan kesimpulan dan hasil (Sugiyono, 2014).

## III. HASIL PENELITIAN

Dalam pembahasan ini ada beberapa kata kunci yang akan kita uraikan yakni: (1) pemimpin negarawan, (2) demokrasi berkeadaban, (3) pemilihan umum Presiden dan (4) Indonesia emas. Dalam konteks pemimpin negarawan, bagaimanakah korelasinya dengan pemilihan umum demokratis yang berkeadaban dalam pemilu Presiden menuju Indonesia emas. Dalam analisis penelitian ini, peneliti akan mengupas pemilihan umum sebagai sarana demokrasi untuk mencari pemimpin negarawan, sebagai negara yang sudah maju seharusnya menjunjung tinggi peradaban, yaitu pemimpin yang bertarung dalam pemilihan umum secara fair, clean dan clear, dengan mengedepankan program pembangunan berkelanjutan, jauh dari politik SARA atau politik identitas.

### 1. Pemimpin Negarawan

Bagaimanakah mencari pemimpin negarawan, secara substansial tipikal sosok pemimpin yang negarawan dan sosok pemimpin politikus akan memiliki dampak yang jauh berbeda. Tipikal sosok pemimpin yang berkarakter negarawan adalah sosok pemimpin yang memiliki sifat mengayomi dan memikirkan masa depan bangsa untuk menitipkan kecemerlangan pada generasi muda yang akan datang. Sosok pemimpin negarawan adalah memiliki idealisme yang kokoh dengan harga diri yang terjaga dan konsisten. Kehadirannya bagai seorang "Father" yang mengantarkannya menjadi sosok sorang yang bijaksana dan berpikir visioner untuk membangun masa depan peradaban yang elegan kepada anak cucunya. (Samsul Nizar, 2015) Untuk mencapai visi, misi ini, kehadiran sosok pemimpin negarawan senantiasa merangkul, mengayomi seluruh kekuatan tanpa melihat perbedaan untuk mencapai maksud yang dicita-citakan, yaitu kebahagiaan dan kedamaian bagi seluruh umat. Seluruh tindakan dan kebijakannya berasal dari sebuah pemikiran yang mendalam dan pertimbangan yang matang. Kematangan pemikirannya ini terlihat dari pandangannya yang jauh ke depan untuk membangun kecemerlangan peradaban yang akan dititipkan pada generasi muda yang akan datang. Contoh sosok negarawan yang teruji oleh zaman adalah seperti Muhammad Rasulullah SAW, Khalifaturrasyidin, atau Umar bin Abdul Aziz. Seorang pemimpin negarawan akan senantiasa lebih meletakkan profesionalisme

dan moral sebagai standar utama. Kebijakannya berangkat dari kepentingan kolektif rakyat dan menjauhkan serta meminimalkan dominasi kepentingan kolektif yang bersumber kepentingan dan dorongan kelompok. Sosok negarawan tak pernah berjanji tidak ditepati. Jika berjanji, janjinya adalah hutang yang akan dipertanggung jawabkan secara vertikal dan horizontal. Baginya, amanah sebagai seorang pemimpin harus membawa kesejahteraan dan kedamaian bagi umat manusia dan seluruh makhluk ciptaan-NYA.

Berbeda dengan tipikal sosok pemimpin politikus yang mana hanya berorientasi memikirkan kepentingannya sesaat demi teraihnya tujuan pribadi dan komunitas politiknya yang terbatas. Meminjam istilah A Syafie Ma'arif, dengan sebutan "politikus rabun ayam" pemilu yang lalu banyak yang hanya melihat sesuatu yang berada di depan mata dengan jarak pendek, tapi tak mampu melihat sesuatu yang jauh ke depan. (Arie Sunaryo, 2014) Pandangan tipikal pemimpin berkarakter politikus hanya mengedepankan diri dan kolektif primordial. Programnya hanya mampu menjadi lip service yang memperindah tapi tak menyehatkan, janjinya adalah bujukan kata mutiara yang sulit diartikan dan direalisasikan, aktualisasi kerja yang dirumuskan hanya menguntungkan sekelompok orang atau segelintir orang yang manfaatnya tak mampu menyeruak lebih luas, senyumnya merupakan bagian tebaran penderitaan bagi umat, kebijakannya hanya untuk membuat mimpi orang banyak yang tak pernah terwujud dalam alam kenyataan, politik yang diterapkan lebih mengedepankan "politik belah bambu", dan penegakan supremasi hukum hanya menganut filosofi pisau bermata tunggal.

Mencari pemimpin negarawan tidak lepas dari peran partai politik sebagai peserta pemilu, baik pemilihan umum presiden maupun pemilihan legislative yang dipilih secara demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* berarti rakyat, dan *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa. Demokrasi berarti rakyat berkuasa atau *government by the people* (Budiardjo, 2007) Dalam kaitannya dengan negara, Amir Machmud sebagaimana dikutip Moh. Mahfud MD (Mahfud M. D, 2000) mengemukakan bahwa negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau

dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat

## 2. Membangun Demokrasi Berkeadaban

Perwujudan demokrasi berkedaulatan rakyat dari waktu ke waktu selalu mendapatkan ujian dalam setiap suksesi kepemimpinan lima tahunan. Dinamika politik mutakhir terjadi karena sikap saling menghargai dan menghormati mulai tergerus oleh ego dan kepentingan jangka pendek. Untuk itu, membangun demokrasi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat prosedural, tetapi secara substansi harus membawa perubahan nilai, pola pikir, dan perilaku. (Simanjuntak, 2016) Kita harus mampu membangun demokrasi yang berkeadaban, yakni demokrasi yang membawa kebaikan dan keluhuran martabat. Bukan demokrasi yang membawa benih-benih perpecahan bagi keutuhan bangsa.

Bangunan fundamental demokrasi di Indonesia tidak akan tumbuh kuat tanpa penegakan hukum dan pemahaman terhadap filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan antar komponen bangsa. Pedoman nilai-nilai tersebut menjadi kunci dalam menjaga semangat ke-Indonesiaan yang berbhineka tunggal ika ini. Kedewasaan berpolitik harus mesti menjadi penuntun kehidupan. Kita tidak boleh terjebak dalam hiruk pikuk politik media sosial yang terkadang penuh dengan manipulasi dan ujaran kebencian serta berbagai berita hoax. Perbedaan dan sikap politik tak boleh membelah anak bangsa pada perpecahan, perbedaan harus menjadi semangat kekuatan dalam memantapkan kebhinekaan dan kemajemukan. Sebab, politik pada hakikatnya adalah upaya untuk membangun konsensus demi kehidupan bersama yang menjamin rasa aman, adil, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Politik yang tumbuh baik akan linier dengan hal-hal positif. Sementara politik yang penuh dengan ancaman, kebencian dan pembunuhan karakter hanya akan melahirkan keburukan.

Peranan partai politik sebagai wadah partisipasi politik warga negara harus terus ditingkatkan. Partai politik perlu memberikan perhatian pada fungsi pendidikan politik masyarakat, partai politik hendaknya tidak hanya mengejar kekuasaan semata, tapi lupa untuk

melakukan pendidikan masyarakat supaya lebih dewasa dalam berpolitik. Lebih dari itu partai politik harus hadir di tengah masyarakat untuk memberi solusi berbagai permasalahan bangsa dan negara berkaitan dengan pendidikan politik.

Negara Indonesia yang berbhineka tunggal ika yang menerima Pancasila sebagai suatu kebenaran dalam demokrasi beradab, oleh karena itu toleransi diperlukan dalam mendukung terciptanya demokrasi beradab ini. Demokrasi yang beradab adalah demokrasi yang mendasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada Alinea IV sebagai landasan konstitusional permanen (Karyono, 2019) dan lebih kongkrit lagi disebut dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” yo Bab VII B tentang Pemilihan Umum pasal 22 E ayat (1-6). Demokrasi beradab hendaknya menghargai hak orang lain sekaligus juga menjunjung tinggi tanggungjawab untuk menunaikan kewajibannya sebagai warga bangsa.

Role model demokrasi kita juga bersumber pada nilai-nilai kearifan lokal bangsa kita yaitu musyawarah mufakat dan kegotong-royongan, tidak tereduksi semata-mata pada mayoritas dan minoritas, tetapi pada kesetaraan hak yang sama sebagai warga bangsa. Demokrasi yang beradab lebih mengedepankan pada semangat untuk mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan umum, demokrasi yang mengutamakan kepentingan bangsa dari pada kepentingan golongan/partai dan individu. Dimana semestinya para elit politik punya tanggung jawab untuk menjunjung tinggi etika/kesantunan dalam berpolitik, mengedepankan persatuan dan kesatuan, menjaga keberagaman serta merawat komitmen nilai-nilai kebangsaan. Inilah bentuk demokrasi beradab yang harus kita bangun terus, dengan maksud tidak hanya sekedar membentuk pemerintahan yang berkuasa melalui pemilihan umum legislatif dan eksekutif, melainkan juga menciptakan suatu atmosfir baru dalam dunia politik untuk menuju pada keadaban baru negara bangsa yakni Indonesia Sejahtera.

Demokrasi sebagai sistem politik tidak hanya sekedar membentuk pemerintah yang dilegitimasi melalui pemilihan umum. Demokrasi

secara prosedural harus sejalan dengan demokrasi secara substansial (Janda et al., 2012) Oleh karena itu dalam pemilihan umum kita tidak hanya sekedar mengisi kursi-kursi yang ada di legislatif maupun eksekutif, tetapi dalamacamata yang lebih luas, pemilu itu dimaksudkan untuk menciptakan suatu peradaban yang baru. Pemerintah hasil pemilu bersama rakyat dalam perjalanannya akan menciptakan keadaban masyarakat, bangsa dan negara baru yang tentunya semakin baik ke depan.

Tetapi tak dapat dipungkiri bahwa dalam perebutan kekuasaan melalui sistem pemilu ini, politik Indonesia dihiasi dengan strategi yang kadangkala penuh intrik, maka tak heran hoax untuk menjatuhkan lawan sering berseliweran dalam medan politik kita, termasuk penggunaan politik identitas. Sering perdebatan dan adu argumen mengenai program kerja dan berbagai kegiatan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kalah dengan perilaku oknum politisi kita yang lebih senang saling sahut menyahut soal issue-issue yang sama-sama tahu isinya hoax, saling menjatuhkan dan hanya untuk sensasional belaka.

Perilaku oknum politisi semacam ini merupakan kegagalan dalam membangun demokrasi yang substansial yakni demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Perilaku-perilaku dalam kehidupan politik ini yang perlu diubah menjadi perilaku baru atau habitus baru. Keadaban negara bangsa yakni Indonesia Sejahtera akan semakin terwujud jika kesadaran akan pentingnya politik sebagai upaya untuk mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia merasuk sanubari setiap politikus. Dan kesadaran ini harus teraktualisasi dalam kerja-kerja konkret dan produktif yang mengarah ke keadaban negara bangsa yakni Terwujudnya Indonesia Sejahtera. Ini semua menjadi mudah apabila Demokrasi Substansial yang kita bangun adalah demokrasi yang beradab, sehingga demokrasi prosedural yang lebih soal teknis dan tahapan bertujuan semata-mata untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang berupaya menuju ke keadaban negara bangsa yakni Indonesia Sejahtera (Sahya Anggara, 2013)

### 3. Dinamika Peta Politik Jelang Pilpres 2024

Proses Pemilihan Umum telah dimulai yakni dengan membuka pendaftaran untuk partai politik peserta Pemilu tahun 2024 yang sudah

dilaksanakan sejak tanggal 29 Juli 2022 s.d. 13 Desember 2022. Tercatat sebelas Partai telah mendaftarkan diri pada minggu pertama. Pembukaan pendaftaran tersebut menjadi awalan formal dimulainya dinamika politik untuk jelang pemilu 2024. Sedangkan Pendaftaran Pemilihan Capres/Cawapres semakin dekat yakni akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 s.d. 25 November 2023, tinggal 10 bulan lagi. Seiring dengan itu dinamika politik pilpres sudah semakin memanas. Padahal, masa jabatan Presiden masih 2 tahun, tepatnya sampai 20 Oktober 2024.

Jika dilihat berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dipasal 222, ditegaskan bahwa pasangan calon Prtesiden/wapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR, tentunya partai politik pengusung bakal calon Presiden melakukan penjajakan koalisi untuk menyatukan program yang berkelanjutan untuk Indonesia yang lebih sejahtera, bukan program yang asal antitesa terhadap pencapaian pembangunan sebelumnya. Apalagi mengusung calon yang arahnya bertentangan dengan idiologi dan dasar negara. Belum adanya kesepakatan siapa bakal calon ataupun calon presiden/wakil presiden, sekarang masyarakat sudah dihadapkan informasi dimedia sosial, media cetak dan media elektronik manuver bakal calon yang seolah-olah sudah calon presiden. Hal ini harus kita cermati bersama, bagaimana kita melakukan guidance kepada pemilih muda agar mengambil/memilih calon pemimpin negarawan, bukan calon pemimpin yang hanya bisa membual saja.

Pemetaan partai politik, terutama untuk koalisi-koalisi pencalonan presiden dan wakil presiden, sudah bisa kita dibaca per hari ini. Di kelompok pertama tentu ada PDIP yang telah berhasil meraih suara 27 persen. Perolehan suara PDIP, secara legal konstitusional PDIP sudah memenuhi persyaratan presidential treshold tanpa harus susah payah berkoalisi dengan partai lain. Dengan kata lain, dengan perhitungan egoistis PDIP sesungguhnya bisa saja menyatukan kubu Puan Maharani dan kubu Ganjar Pranowo sebagai kandidat untuk mengusung keduanya sebagai capres dan cawapres 2024 (Moh. Ali Andrias,

Taufik Nurohman, 2013). Namun perhitungan politik tentu tidak demikian. Perolehan suara di bawah 50 persen masih sangat riskan jika mengusulkan sendiri. PDIP bisa "ambyar" jika dikeroyok alias jika PDIP ternyata hanya berhadapan dengan satu atau dua pasangan lawan. Karena itu, opsi memboyong Puan dan Ganjar sekaligus nyaris tidak pernah naik ke permukaan. Kemudian, atas landscape dan latar politik itu pula, PDIP tentu akan terus memantau perkembangan dan dinamika politik yang ada untuk menemukan sekutu atau kawan yang pantas untuk dijadikan "sahabat" politik menghadapi Pilpres 2024. Peluang yang sering digadag-gadag adalah dengan Gerindra, yang konon terkait dengan kesepakatan Batu Tulis pada tahun 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sekarnoputri dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun persoalannya, dengan raihan suara nomor satu secara nasional, tentu PDIP akan sangat sulit untuk menerima tawaran posisi calon wakil presiden untuk calon presiden dari partai yang meraih suara nomor tiga secara nasional, yaitu Partai Gerindra. Dengan demikian, PDIP akan sangat berpeluang tinggal landas bersama partai lain yang tentu kemungkinan bersedia diberi tawaran untuk mengisi posisi sebagai calon wakil presiden. Demikian Gerindra, partai ini pun nampaknya demikian juga. Berjuang mempetahankan kesepakatan Batu Tulis secara matematika politik nampaknya bukan pilihan yang rasional, meskipun hubungan Prabowo dengan Megawati terlihat sangat-sangat baik dan cair sejauh ini. Jadi bisa dipahami mengapa Gerindra menyambut hangat kedatangan partai PKB besutan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin belum lama ini. Perolehan suara Gerindra yang 17 persen lebih dari cukup untuk berpasangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang membukukan suara 9 persen di pemilihan terdahulu (2019). Kedua partai ini berpeluang besar menjadi daya tarik tersendiri bagi partai-partai kecil dibawahnya untuk saling mendukung dan bergabung, terutama partai-partai yang tidak memiliki tokoh menonjol secara elektoral mengingat Prabowo dan Cak Imin terbukti cukup matang dalam berinteraksi dengan partai dan elite politik di luar partainya sendiri. Di sisi lainnya, ada pula calon koalisi potensial dengan kandidat yang tak kalah potensial pula, yakni Demokrat, Nasdem, dan PKS. Ketiga partai

ini sedang menjajaki langkah strategis menuju 2024 dengan dua nama unggulan, yakni Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Anies ternyata menjadi nama unggulan di dalam Partai Nasdem berdasarkan hasil RAKERNAS Nasdem pada Juni 2022 lalu. Sementara itu, AHY pun sudah menjadi "jualan" lama Partai Demokrat sejak meninggalkan karier militer untuk ikut Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu, sekalipun pernah gagal dalam pemilu di DKI. Dan lagi-lagi, AHY pun sama dengan Anies dihadapan PKS. AHY nampaknya akan sangat bisa berdampingan dengan PKS di laga 2024 nanti. Koalisi tiga partai (Demokrat, Nasdem dan PKS) ini diprediksi mampu memberi warna tersendiri pada peta politik nasional sampai tahun 2024 nanti. Karena, perpaduan Anies Baswedan dan AHY diperkirakan akan sangat potensial menarik perhatian pemilih di laga mendatang di satu sisi dan berpotensi mengusik status quo politik Teuku Umar dan Hambalang di sisi lain. Dan tak lupa, di panggung lainnya ada kandidat koalisi Indonesia Baru besutan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP. Koalisi ini memang memenuhi ketentuan presidential threshold, tapi diprediksikan akan cukup sulit untuk bertarung secara politik di hadapan tiga pengelompokan politik arus utama di atas mengingat Airlangga sebagai tokoh sentral yang digadang-gadang sebagai "jualan" KIP untuk Pilpres 2024, masih jauh dari rasa aman secara elektoral. Nama Airlangga dalam berbagai survey masih di posisi terbawah dalam survei-survei politik dua tahun belakangan. Semua pemetaan ini belum tetap, masih sangat cair, koalisi ini belum "terkunci" posisi politiknya. Bahkan sangat mungkin akan ada cerita baru jika KIB berhasil menggaet nama wakil yang cukup potensial untuk Airlangga, baik potensial secara elektoral ataupun potensial secara finansial. Sebut saja, contohnya Erick Tohir atau Ridwan Kamil (jika berkeinginan) atau Sandiaga Uno (walaupun cukup sulit) atau pula Ganjar Pranowo (walaupun sangat kecil peluangnya). Tapi jika hingga tahun 2024 nama Airlangga belum juga pada posisi bagus dalam survei-survei politik di satu sisi dan gagal dalam membawa pasangan potensial untuk mendampingi Airlangga di sisi lain, maka anggota koalisi akan sangat berpotensi mencari tempat parkir yang lebih

memungkinkan dan potensial dan menjanjikan. PPP dan PAN masih berpeluang terbawa ke kubu Hambalang atau Teuku Umar, atau bahkan ke barisan Nasdem-Demokrat-PKS. Namun bagaimanapun, pengelompokan peta politik ini masih temporal sifatnya. Peta politik bisa saja berubah jika ada gempa dan terjadi pergeseran lempeng politik secara mendadak, terutama jika salah satu kandidat presiden potensial (sebut saja nama tiga besar hasil survei) berpindah haluan. Misalnya jika Ganjar gagal diusung oleh PDIP dan memutuskan maju tanpa PDIP, maka akan berpotensi terjadi pergeseran dan perubahan keputusan politik dalam koalisi-koalisi lain atas capres dan cawapres yang akan mereka usung. Hal ini sangat bisa terjadi karena di satu sisi santer di-framing di ruang publik bahwa sangat kecil peluangnya Megawati dan PDIP untuk memilih Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP pada 2024. Tapi di sisi lain tak bisa dipandang sebelah mata bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo kian hari kian "meroket", nama Gubernur Jawa Tengah ini tak pernah keluar dari posisi tiga besar berbagai lembaga survei yang ada. Fakta ini akan membuat Ganjar Pranowo menjadi incaran semua partai apa bila PDIP tak bersedia mencalonkan Ganjar. (Gatra, 2022)

#### 4. Pemimpin Negarawan dan Indonesia Emas

Indonesia Emas 2045 adalah suatu upaya dalam membangun generasi emas yang dimana adalah sebuah konsep penerapan untuk menyiapkan suatu generasi penerus bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka antara tahun 1945 sampai tahun 2045. Indonesia emas 2045 adalah suatu masa yang pasti datang dan harus kita jemput dengan penuh kebahagiaan. Indonesia emas akan dipimpin oleh generasi yang saat ini berusia 20 tahun yang kurang lebih jumlahnya 100 jutaan orang yang pada tahun 2045 mereka ini akan berada dalam usia produktif. Mereka akan menjadi sumber kekuatan bangsa dan negara. Karena itu, mereka perlu diasuh dengan baik, diarahkan dengan benar, dididik dengan tepat, dan dilatih dengan semangat juang yang tinggi dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dengan tetap Berbinneka Tunggal Ika serta memegang teguh kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Membangun semangat juang tinggi kepada generasi muda, maka kita harus mengarahkan dan

memdidik bagaimana mencintai bangsa dan negara. Salah satunya adalah dalam partisipasi pemilihan umum 2024. Pemilihan Umum 2024 adalah momentum suksesi kepemimpinan dan saatnya memilih pemimpin negarawan, baik dalam pemilihan umum Presiden maupun pemilihan umum legislatif. Dalam pemilihan umum Presiden sekalipun dalam pemetaan partai politik pengusung bakal calon Presiden dan Wakil Presiden masih sangat cair, namun sudah bisa kita cermati bersama masing-masing rekam jejak dalam berbagai kegiatan sebelumnya. Pemimpin yang baik bercirikan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemimpin yang bersih dan berintegritas, bebas dari beban masa lalu, tidak pernah terkait kasus korupsi, serta konsisten antara ucapan dan tindakan.
- b. Pemimpin yang visioner, yang mampu membaca peta kompetensi global dan membawa bangsa kita untuk menang dalam kompetensi di berbagai bidang.
- c. Pemimpin yang aspiratif, profesional, yang memahami, membela, dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas segalanya.
- d. Pemimpin yang Problem Solver. mampu menyelesaikan masalah dan bukan yang justru menimbulkan masalah.
- e. Pemimpin yang kompeten, mengerti manajemen pemerintah, memahami semua potensi dan kekuatan bangsa dan mampu mengelolanya kesejahteraan bangsa (Leba, 2022)
- f. Kita harus mampu membangun demokrasi yang berkeadaban, yakni demokrasi yang membawa kebaikan dan keluhuran martabat. Bukan demokrasi yang membawa benih-benih perpecahan bagi keutuhan bangsa. Bukan demokrasi yang hanya berebut kekuasaan belaka, bukan demokrasi yang hanya bisa menebar intrik berita bohong (hoax) untuk menjatuhkan lawan, termasuk penggunaan politik identitas. Namun yang kita harapkan adalah membangun demokrasi dengan mengedepankan adu argumen mengenai program kerja dan berbagai kegiatan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, program yang berkelanjutan untuk bangsa.

#### IV. KWSIMPULAN

Pemimpin negarawan adalah sosok pemimpin yang memiliki sifat mengayomi dan memikirkan masa depan bangsa untuk menitipkan kecemerlangan pada generasi muda yang akan datang. Sosok pemimpin negarawan adalah memiliki idealisme yang kokoh dengan harga diri yang terjaga dan konsisten. Kehadirannya bagai seorang “Father” yang mengantarkannya menjadi sosok sorang yang bijaksana dan berpikir visioner untuk membangun masa depan peradaban yang elegan kepada anak cucunya. Sosok negarawan tak pernah berjanji pepesan kosong. Jika berjanji, janjinya adalah hutang yang akan dipertanggung jawabkan secara vertikal dan horizontal. Baginya, amanah sebagai seorang pemimpin harus membawa kesejahteraan dan kedamaian bagi umat manusia dan makhluk ciptaan-Nya

Membangun demokrasi yang berkeadaban, yakni demokrasi yang membawa kebaikan dan keluhuran martabat. Bukan demokrasi yang membawa benih-benih perpecahan bagi keutuhan bangsa Demokrasi yang beradab adalah demokrasi yang mendasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada Alinea IV sebagai landasan konstitusional permanen, dan lebih kongkrit lagi disebut dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” yo Bab VII B tentang Pemilihan Umum pasal 22 E ayat (1-6). Demokrasi beradab hendaknya menghargai hak orang lain sekaligus juga menjunjung tinggi tanggungjawab untuk menunaikan kewajibannya sebagai warga bangsa.

Pemetaan partai politik, terutama untuk koalisi-koalisi pencalonan presiden dan wakil presiden, sudah bisa kita dibaca per hari ini, berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dipasal 222, ditegaskan bahwa pasangan calon Prtesiden/wapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR. Nominasi bakal calon Presiden dan wakil Presiden yang muncul dari

Partai Nasdem, PKS, Demokrat adalah Anis Baswedan, AHY. Nominasi dari partai PDIP adalah Ganjar dan Puan Maharani, Nominasi dari Gerindra dan PKB adalah Prabowo dan Cak Imin, nominasi dari Golkar adalah Airlangga Hartato. Nominasi bakal calon tersebut muncul dimedia cetak dan elektronik berdasarkan hasil survey yang sangat mungkin berubah pada saat hari H, namun paling tidak sebagai pelajaran untuk generasi muda sebagai pemilik suara untuk bisa belajar banyak tentang rekam jejak dalam penentuan pemimpin negarawan.

Indonesia Emas 2045 adalah suatu konsep dalam upaya mempersiapkan, membangun generasi emas yakni menyiapkan suatu generasi penerus bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka antara tahun 1945 sampai tahun 2045. Indonesia emas 2045 adalah suatu masa yang pasti datang dan harus kita jemput dengan penuh kebahagiaan. Indonesia emas akan dipimpin oleh generasi yang saat ini berusia 20 tahun yang kurang lebih jumlahnya 100 jutaan lebih orang yang pada tahun 2045 mereka ini akan berada dalam usia produktif. Mereka akan menjadi sumber kekuatan bangsa dan negara. Karena itu, mereka perlu kita diasuh dengan baik, diarahkan dengan benar, dididik dengan tepat, dan dilatih dengan semangat juang yang tinggi dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dengan tetap memegang teguh Binnekhha Tunggal Ika dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## REFERENCES

- Arie Sunaryo. (2014). *Syafii Maarif: Pemilu lalu banyak hasilkan politisi rabun ayam* [News]. Merdeka.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.

- Gramedia.
- Gatra, S. (2022, August 6). *Membaca Peta Politik Jelang 2024*. KOMPAS.com.
- Janda, K., Berry, J. M., & Goldman, J. (2012). *The challenge of democracy: American government in global politics* (11. ed). Wadsworth.
- Karyono, H. (2019). *Membangun Demokrasi Berkeadaban Dan Dinamika Pemilihan Presiden Langsung 2019*. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 16 (2).
- Leba, E. G. (2022). *Pemimpin Indonesia Emas 2045*. *Anak Sabu Raijua*.
- Moh. Mahfud M. D. (2000). *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia* (Cet. 2). Rineka Cipta.
- Prof. Dr. Samsul Nizar. (2015, September 2). *Negarawan Versus Politikus* (Prof. Dr. Samsul Nizar). *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Simanjuntak, J. (2016). *Membangun Demokrasi yang Berkeadaban*. News.
- Latipah Nasution, 2017. *Pemilu Dan Kedaulatan Rakyat*. adalah: *Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol.1 No.9.
- Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, 2012. *Demokrasi*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Mudiyati Rahmatunnisa, 2017. *Mengapa Integritas Pemilu Penting*. *Jurnal Bawaslu*. Vol. 3 No. 1.
- Prof. Dr. Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sahya Anggara, 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.
- Moh. Ali Andrias, Taufik Nurohman, 2013. *Partai Politik dan Pemilukada (Analisis Marketing Politik dan Strategi Positioning Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya)*. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*. Vol. 1 No. 3.